

ABSTRACT

The use of electronic signatures to replace manual signatures on documents resulting from government administration services and public services plays an important role in supporting digital transformation in the government sector. In 2021, the Magelang City Government has collaborated with the Electronic Certification Center for the use of electronic signatures in its electronic government system services. However, until the end of 2022 the implementation of electronic signatures in the Magelang City Government is still low. Of the 28 agencies in the Magelang City Government, only 4 agencies have implemented electronic signatures.

This research aims to develop a framework as a guide for local governments in analysing the readiness measurement of electronic signatures implementation using the modified STOPE framework. Evaluation of the framework is done by testing the framework to conduct readiness measurement analysis and validation of the framework is done through interviews to get feedback and input.

This research resulted in a framework for analysing electronic signatures implementation readiness measurement in local government. The results of the readiness measurement analysis show that the Magelang City Government is on the ready scale with a percentage of 73.09%. Based on the evaluation of the framework, it is known that the framework can be used to analyse the readiness measurement of electronic signatures implementation and determine the readiness ranking, strengths, weaknesses and problems that affect the implementation of electronic signatures in local government.

Keywords : electronic signature, e-government, e-readiness, STOPE framework

INTISARI

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk menggantikan tanda tangan basah pada dokumen hasil layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik berperan penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Magelang telah menjalin kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk pemanfaatan TTE pada layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimiliki. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2022 penerapan TTE di Pemerintah Kota Magelang masih rendah. Dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Pemerintah Kota Magelang, baru 4 OPD yang menerapkan TTE pada layanan SPBE yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kerja sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan analisis pengukuran kesiapan penerapan TTE dengan menggunakan modifikasi *STOPE framework*. Evaluasi kerangka kerja dilakukan dengan cara menguji coba kerangka kerja yang telah disusun untuk melakukan analisis pengukuran kesiapan dan validasi kerangka kerja dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap kerangka kerja dan hasil analisis pengukuran kesiapan yang dihasilkan.

Penelitian ini menghasilkan kerangka kerja untuk analisis pengukuran kesiapan penerapan TTE di pemerintah daerah. Hasil analisis pengukuran kesiapan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang berada pada skala siap dengan persentase 73,09%. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa kerangka kerja yang telah disusun dapat digunakan untuk melakukan analisis pengukuran kesiapan penerapan TTE serta mengetahui peringkat kesiapan, keunggulan, kelemahan dan permasalahan yang berpengaruh terhadap penerapan TTE di pemerintah daerah.

Kata kunci – tanda tangan elektronik, SPBE, *e-readiness*, *STOPE framework*